

## **PROSPER INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA (ISLAM) DI KODYA MATARAM : Sebuah Kajian Awal**

*Oleh: Harisun Arsyad*

### **I. PENDAHULUAN**

Keberhasilan suatu pembangunan tidak terkecuali bidang agama, akan sangat mudah diukur apabila memiliki suatu rumusan yang disebut indikator. Namun bagi pembangunan bidang agama, meskipun telah dilakukan upaya ke arah itu, sampai saat ini belum memiliki rumusan indikator yang tegas dan mewakili semua kalangan umat beragama. Hal ini karena agama selain mempunyai banyak dimensi juga termasuk kategori pembangunan non fisik. Padahal untuk memantapkan sasaran pembangunan pada setiap Repelita dalam Pembangunan Jangka Panjang II rumusan-rumusan keberhasilan pembangunan di bidang agama tersebut sangat diperlukan dan mendesak.

Jika melihat ruang lingkup yang dicakup dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, pembangunan bidang agama tampak semakin luas. Hal ini sebagai akibat dari proses kesinambungan pembangunan yang diletakkan pada PJPII berdasarkan capaian-capaian yang telah diperoleh pada masa PJP I. Yaitu memperkuat terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa,

selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Berangkat dari aerangkaian kegiatan yang telah dilakukan Badan Litbang Agama dalam rangka perumusan indikator keberhasilan pembangunan bidang agama, baik lokakarya (1979), Sarasehan (1988), maupun penyusunan draft rumusan indikator yang diikuti dengan uji coba (1991-1992 dan 1993 - 1994), maka pada tahun anggaran 1996-1997, Badan Litbang Agama berupaya merumuskan dan menyederhanakan item-item indikator dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan atau validitas data. Untuk lebih memperoleh gambaran yang konkrit maka upara tersebut perlu diikuti dengan langkah menguji cobakan kembali ke beberapa daerah dengan komunitas Islam; dan salah satu diantaranya adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kajian ini rumusan indikator yang telah dihasilkan terdahulu akan dipadukan dengan konsep sasaran pembangunan bidang agama pada Repelita VI seperti yang tertuang dalam GBHN 1993, terutama mencakup data dasar, kelembagaan agama, dan tenaga keagamaan. Yang dimaksud data dasar adalah jumlah penduduk, pemeluk Islam, penduduk menurut umur dan jumlah kepala keluarga. Yang dimaksud dengan kelembagaan agama yaitu mencakup tempat ibadah, unit pengajian, pendidikan keagamaan, perceraian dan jamaah haji. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga keagamaan adalah penyuluh agama, mubalig, guru agama (Nip. 13 dan 15), dosen agama dan hakim di Pengadilan Agama.

Sasaran penelitian ini adalah para aparat pemerintah dalam wilayah Kodya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kanwil Departemen Agama, Kandepag, Kantor Statistik, Pemda, Kanwil Depdikbud, dan Pengadilan Tinggi Agama. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan data melalui kajian dokumen, laporan, brosur dan buku-buku serta wawancara bebas kepada sejumlah informan kunci. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

## **H. KONDISI WILAYAH DAN SOSIAL BUDAYA**

Kodya Mataram sebagai salah satu dari Dati II di Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki wilayah seluas 61,30 Km<sup>2</sup>. Secara geografis Kodya Mataram terletak di ujung paling barat Pulau Lombok, dengan posisi  $116^{\circ}07'$  bujur timur dan  $08^{\circ}33' - 08^{\circ}42'$  lintang selatan. Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Narmada, sebelah timur oleh Kecamatan Narmada, sebelah selatan oleh Kecamatan Labuapi, dan sebelah barat oleh selat Lombok. Karena Bandara Udara Selaparang terletak di wilayah kodya ini, maka Mataram merupakan salah satu pintu gerbang bagi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tanahnya merupakan dataran rendah yang cukup subur dengan ketinggian mencapai 16 m dari permukaan laut. Akibat perkembangan kota Mataram yang pesat telah menjadikan penggunaan tanahnya 41,40 km<sup>2</sup> atau 67,54% cenderung untuk pusat pemerintah, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pemukiman/pekarangan kepentingan lainnya; sedang sisanya 19,90 Km<sup>2</sup> masih digunakan untuk kepentingan pertanian.

Hal ini ditandai oleh hamparan sawah yang cukup subur dan didukung oleh 4 buah sungai yang mengalir ke wilayah ini, yaitu

Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Umus.

Kodya Mataram dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, membawahi 3 wilayah administrasi kecamatan yaitu Ampenan, Mataram dan Cakranegara, 23 Kelurahan dan 245 lingkungan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka hari jadi Kodya Mataram jatuh pada 31 Agustus 1993. Sebelum itu, ia berstatus Kotif Mataram berada di dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat, yang dibentuk atas dasar PP Nomor 21 Tahun 1978. Hal ini dimungkinkan, karena melihat perkembangan atau pertumbuhan kota Mataram yang cukup pesat, sehingga perlu penanganan secara khusus. Dengan terbentuknya Kodya Mataram, maka praktis secara administratif wilayah ini terpisah dari Kabupaten Lombok Barat. Namun, dalam waktu yang relatif singkat (1994-1996), peralihan penyelenggaraan pemerintah oleh semua instansi di daerah ini tidak mungkin berlangsung secara otomatis dan cepat. Banyak hal yang masih menjadi kendala, diantaranya adalah menyangkut bangunan perkantoran, tenaga kerja/pegawai, dan anggaran belanja daerah. Demikian pula aspek sosial budaya masyarakat di kedua wilayah ini (Kodya Mataram dan Kabupaten Lombok Barat) yang telah menyatu sejak lama, tidak mungkin begitu saja dipisahkan satu dengan lainnya.

Menurut hasil Sensus Penduduk 1990, jumlah penduduk Kodya Mataram tercatat sebesar 275.089 jiwa. Jumlah penduduk ini kemudian berkembang menjadi 278.316 jiwa pada tahun 1994, yang terdiri dari 140.088 laki-laki dan 138.228 perempuan. Kepadatan penduduknya rata-rata 4.540 jiwa per kilometer persegi, diantaranya kecamatan yang terpadat adalah kecamatan Mataram mencapai 5.518 jiwa per kilometer persegi. Dalam unit yang lebih kecil rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 5 jiwa.

Jika dilihat dari usia penduduk, maka penduduk usia dewasa tampak lebih besar

daripada mereka yang berusia anak-anak, dengan jumlah masing-masing yang dewasa 195.129 jiwa atau 70.11 % dan anak-anak 83,187 jiwa atau 29,89%.

Sampai akhir Pelita V Kota Mataram yang dijadikan pusat Pembangunan Bagian Tengah, telah berhasil meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah Kodya Mataram. Dengan peningkatan tersebut telah memacu tumbuhnya sentra-sentra ekonomi di daerah ini yang mencakup kepariwisataan, perdagangan, industri dan jasa lainnya baik formal maupun informal. Akibatnya mobilitas sosial dan urbanisasi penduduk desa ke kota Mataram - sebagai ibukota Dati II dan sekaligus ibu kota Propinsi NTB ~ tampak makin meningkat. Di pihak lain, mata pencaharian penduduknya pun menjadi sangat beragam, meliputi semua aspek kegiatan perekonomian sebagaimana tersebut di atas, tidak terkecuali juga sektor pertanian.

Komposisi penduduk menurut agama (1994) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kodya Mataram adalah beragama Islam, yaitu 220.062 jiwa atau 79,07 %. Selebihnya penduduk memeluk agama Hindu 48,082 jiwa atau 17.28%, agama Budha 4,590 jiwa atau 1,65%, agama Kristen Protestan 3,908 jiwa atau 1,40%, dan agama Katolik 1,674 jiwa atau 0,60%. Dengan semacam ini, maka secara umum budaya masyarakat Lombok lebih bercorak Islam.

Secara historis, Islam masuk ke Lombok pada pertengahan abad ke 15 dengan membawa berbagai perubahan terhadap sikap hidup Suku Sasak, bahkan sikap keberagamaan mereka terkesan fanatik (Profil Propinsi NTB, hal. 292). Suku Sasak yang merupakan penduduk asli itu, tersebar di semua wilayah : Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kodya Mataram. Karena adanya rasa kesamaan dan kesatuan budaya di kalangan mereka, masyarakat lebih senang menyebut Pulau Lombok dengan istilah "Bumi Sasak". Sebutan lain yang pernah diberikan terhadap pulau ini

adalah "Pulau Selaparang" yang mengacu kepada nama sebuah kerajaan di Lombok Timur. Bertolak dari sisi ini, maka masyarakat di keempat wilayah Jati II tersebut tidak dapat dipisahkan dari Peta Lombok atau Peta Sasak baik dari segi sosial budaya maupun agama (bandingkan dengan H. Fathurahman Zakaria dalam "Patut Patuh Patju" Sebagai Kerangka Acuan Kehidupan Masyarakat Lombok, hal.2).

Pada masa pembangunan dewasa ini tradisi kehidupan masyarakat yang terkenal sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan semakin mendapat tempat. Gambaran tentang hasil pembangunan tersebut di antaranya dapat dilihat dari peningkatan jumlah sarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan, jumlah jemaah haji, dan ketersediaan tenaga keagamaan sebagaimana disajikan dalam indikator berikut.

### **III. ASPEK-ASPEK INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA DAN PROSPEKNYA**

Kegiatan uji coba (try out) penyusunan indikator keberhasilan pembangunan bidang agama kali ini (1996-1997) merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Badan Litbang Agama. Dalam kegiatan ini telah diupayakan untuk menyederhanakan kategori yang dirancang untuk dijadikan indikator yang resmi. Kategori tersebut terdiri atas data dasar, data kelembagaan dan data tenaga keagamaan. Tiap kategori telah pula disiapkan ramus bagi pembandingan/pengukurannya sesuai dengan hasil try out dan diskusi tahun-tahun sebelumnya. Pada dasarnya try out kali ini tidak melakukan pengujian terhadap substansi kategori yang disusun dalam instrumen, tetapi tugas peneliti adalah mengumpulkan data untuk melihat sejauhmana ketersediaan data di lapangan dan kemudian mencoba menganalisisnya.

Dari hasil penelusuran data di lapangan dengan mengguriakan format instrumen yang telah disiapkan dari Jakarta dapat disampaikan temuan-temuan lapangan sebagaimana uraian berikut.

### 1. Data Dasar

Ada tiga macam data yang diangkat untuk dijadikan sebagai pengimbang data keagamaan, yaitu jumlah penduduk, jumlah umat beragama Islam, dan jumlah kepala keluarga (KK). Untuk memperoleh data kependudukan secara umum tidak diperoleh kesulitan, karena telah tersedia secara kontinyu di Kantor Statistik melalui hasil sensus atau pun lewat registrasi penduduk yang dilaksanakan dua kali setahun pada pertengahan dan akhir tahun yang bersangkutan. Demikian pula untuk data umat beragama; data ini diperoleh dari Kantor Dep. Agama lewat instansi yang terkecil untuk dihimpun oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian disajikan oleh Kantor Statistik. Hanya saja untuk data kepala keluarga tidak disajikan oleh Kantor Statistik, sehingga harus merujuk kepada data yang disajikan oleh Kantor Depdikbud setempat. Sementara karena kepentingan yang berbeda, bisa jadi penyajian data tersebut akan berbeda hasilnya jika dilakukan oleh Kantor Statistik.

### 2. Data Kelembagaan Agama

Ada sejumlah kategori data yang diangkat guna dijadikan bahan rumusan indikator, yaitu masjid, majlis taklim (MT), pengajian anak-anak (TPA), pendidikan keagamaan dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, pondok pesantren, perceraian, dan jamaah haji. Kategori yang disajikan ini adalah merupakan penyederhanaan dari sejumlah kategori lainnya yang pernah diuji cobakan pada tahun 1991-1994. Berdasarkan pertimbangan yang pernah diajukan ketika itu, maka dalam kesempatan kali ini diupaya-

kan untuk mengangkat aspek-aspek yang memungkinkan ketersediaan data dan cukup representatif.

Pada umumnya data kelembagaan agama dalam kurun waktu 5 tahun sekalipun, bisa diperoleh melalui laporan atau pun penyajian data lainnya. Hanya saja beberapa kendala sering dialami, seperti data masjid tidak menggambarkan secara tegas mengenai daya tampung dari masing-masing masjid.

Selain itu ada data yang tidak konsisten dalam penyajiannya, seperti jumlah majlis taklim, jumlah Madrasah Ibtidaiyah, atau ada data yang tidak jelas sehingga sulit diangkat, seperti jumlah Madrasah Diniyah.

Jumlah masjid dari tahun ke tahun menunjukkan angka kenaikan, terakhir pada tahun 1995-1996 berjumlah 179 buah. Untuk pengajian (MT) selama 5 tahun jumlahnya mengalami perubahan, dua tahun pertama sama 155 buah, dua tahun berikutnya turun menjadi 90 buah dan tahun 1995-1996 naik kembali menjadi 141 buah. Sedangkan data pengajian anak-anak (TPA) baru tersedia pada tahun 1993, yaitu sejak tahun pertama terbentuknya di Kodya Mataram. Sejak tahun itu hingga tahun terakhir jumlahnya tetap sama, yaitu 30 buah.

Data pendidikan keagamaan yang mencakup madrasah diniyah, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Al-jami'ah, juga cukup tersedia, tetapi sedikit mengalami kesulitan untuk memperoleh data madrasah diniyah. Hal ini disebabkan kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga datanya pun tidak jelas. Apalagi untuk jenis pendidikan madrasah ini juga terbagi lagi dalam tiga tingkatan, yaitu Madrasah Awaliyah, Madrasah Wusta dan Madrasah Ulya. Adapun jenis pendidikan MI, MTs, dan MA dalam perkembangannya selama lima

tahun terdapat varian. Untuk MI pada tahun 1992-1993 mengalami penurunan 3 buah dari tahun sebelumnya, namun kemudian pada tahun berikutnya naik menjadi 19 buah hingga pada tahun 1995-1996. Sedangkan untuk Mts, dan MA pada tahun 1995-1996 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama MTs. Hampir sepanjang lima tahun mengalami kenaikan, sehingga pada tahun 1995-1996 jumlah Mts. Mencapai 19 buah dan MA 5 buah. Di pihak lain data pendidikan tingkat perguruan tinggi (Al-jami'ah) tampaknya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, yaitu hanya satu buah. Masih dalam konteks pendidikan keagamaan, di Kodya Mataram juga terdapat pondok pesantren (Ponpes). Perkembangan Ponpes selama lima tahun memperlihatkan angka kenaikan; jika pada tahun 1991-1992 berjumlah 8 buah, maka keadaan pada tahun 1995-1996 menjadi 11 buah.

Data tentang perceraian juga mudah untuk diperoleh laporannya di lapangan. Data ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan layanan aparat Departemen Agama di masyarakat. Data yang ditampilkan adalah perceraian yang telah diputus oleh pengadilan, sehingga tidak mesti semua data yang diselesaikan pada tahun yang bersangkutan menggambarkan murni perkara yang masuk pada tahun itu. Selain itu menurut informasi aparat di PTA, walaupun UU Perkawinan telah berlaku selama 22 tahun, ternyata masih ada saja masyarakat yang tidak melakukan perceraian melalui pengadilan. Data tentang perceraian yang tercatat di PTA pada tahun 1995-1996 adalah sebanyak 111 perkara.

Dipihak lain data jamaah haji sama sekali tidak mengalami kesulitan. Data ini juga memiliki berbagai keragaman ciri, seperti jumlah jamaah menurut tempat pembayaran, jumlah jamaah menurut usia,

pendidikan dan pekerjaan. Jumlahnya setiap tahun juga cukup bervariasi, terakhir tahun 1995-1996 berjumlah 423 orang.

Data-data tersebut setelah dilakukan analisis menurut rumus pembandingan/-pengukur yang telah disiapkan dan dirancang dalam instrumen, ternyata di antaranya mengalami rasio yang tidak wajar. Contoh pada tahun 1995-1996 untuk data masjid setelah dihitung rasionya menjadi 1 : 0,68, kemudian untuk majlis taklim (MT) rasionya 1 : 0,05, pengajian anak-anak (TPA) rasionya 1 : 0,06 dan Madrasah Tsaiiawiyah (MTs) rasionya 1 : 0,42. Setelah memperhatikan hasil perhitungan tersebut, maka rumus pembandingan/-pengukurnya perlu dicarikan pemecahan yang mendekati.

Selain itu dijumpai pula kendala ketika mencari data usia pendidikan menurut masing-masing jenjang. Peneliti mengalami kesulitan, karena di Kantor Statistik setempat tidak menyajikan data tersebut. Untuk mengatasinya peneliti berusaha menelusuri ke Kanwil Depdikbud, namun juga masih mengalami kendala karena data yang tersedia untuk lima tahun tidak diperoleh secara sempurna.

### 3. Data Tenaga Keagamaan

Sejumlah kategori yang dimunculkan untuk bahan rumusan indikator tentang tenaga keagamaan adalah penyuluh agama, mubaliq, guru agama Islam pada sekolah umum dari tingkat SD sampai SMTA, dosen agama Islam pada perguruan tinggi umum (PTU), dan hakim di Pengadilan Agama (PA). Sama halnya dengan data kelembagaan agama, penelusuran informasi tenaga keagamaan juga telah diupayakan melalui penyederhanaan, terutama informasi tentang mubalig. Sedangkan pemunculan penyuluh agama dan muballig pada uji coba kali ini bukanlah tanpa alasan. Setelah mempertimbangkan hasil uji coba pada tahun 1991-1994 dengan kenyataan bahwa penyuluh agama juga

PROSPER INDIKATOR KEBEHASILAN PEMBANGUNAN  
BIDANG AGAMA (ISLAM) DI KODYA MATARAM : Sebuah Kajian Awal

merupakan salah satu jenis pemuka agama yang kini masuk dalam program Dep. Agama, maka keduanya dipersiapkan untuk rumusan indikator.

Secara umum, peneliti tidak menghadapi kendala untuk memperoleh informasi maupun data tentang hal-hal tersebut pada lingkup Dati II Kodya Mataram, kecuali dalam masalah data dosen agama Islam pada perguruan tinggi umum. Dalam hal ini peneliti sama sekali tidak memperoleh data, baik dari kantor Dep. Agama maupun dari Depdikbud. Sementara lembaga Kopertis dan Kopertais yang terkait dengan pembinaan perguruan tinggi umum maupun Islam di Propinsi NTB berada di luar wilayah propinsi ini, yaitu Denpasar dan Surabaya.

Hasil yang diperoleh melalui penelusuran di lapangan memperlihatkan, bahwa jumlah penyuluh agama hampir setiap tahun tampak meningkat. Jika pada tahun 1991-1992 berjumlah 28, maka pada tahun 1995-1996 keadaannya menjadi 41 orang. Begitu juga yang dialami oleh jenis mubalig. Pada tahun 1991-1992 jumlah mubalig di Kodya Mataram ada 174 orang, kini berkembang menjadi 304 orang. Angka-angka yang agak kurang menguntungkan terjadi pada jumlah guru agama Islam di semua tingkatan (SD sampai SMTA). Gambaran mereka dalam lima tahun menunjukkan perubahan yang tidak tetap antara naik dengan turun. Bahkan dua di antara jenjang pendidikan tersebut, jumlah guru agama pada tahun 1995-1996 lebih kecil dari tahun 1991-1992. Yaitu, guru agama Islam pada tingkat SD yang semula berjumlah 166 orang, kini tahun 1995-1996 menjadi 165 orang. Kemudian jumlah guru agama Islam pada tingkat SMTP, semula berjumlah 29 orang kini menurun menjadi 27 orang. Adapun untuk guru agama pada tingkat SMTA, semula berjumlah 35 kini menjadi 38 orang.

Berkaitan dengan data dan informasi tentang hakim di Pengadilan Agama, keadaannya selama lima tahun cukup mantap. Artinya, selama empat tahun pertama menurut waktu pengkajian,

jumlah hakim ada 5 orang, kemudian pada tahun 1995-1996 naik menjadi 7 orang. Kategori ini dipandang relevan untuk diangkat menjadi indikator keberhasilan pembangunan bidang agama, terutama untuk melihat sejauh mana upaya dalam pembinaan keluarga sakinah.

Sehubungan dengan rumus pembandingan/pengukur yang dirancang untuk mengukur keberhasilan, tampaknya juga mengalami hal yang sama dengan masalah yang telah dibahas di muka. Misalnya, data pada tahun 1995-1996 tentang penyuluh, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan rumus yang dirancang rasionya adalah 1 : 0,15, kemudian mubalig rasionya menjadi 1 : 1,15. Oleh karena itu, masalah pembakuan rumus pembandingan/pengukur yang dirancang oleh Badan Litbang Agama, masih perlu dilakukan pengkajian ulang.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kategori yang disiapkan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang agama sementara ini memang telah cukup memadai, sederhana dan tersedia datanya di Tingkat Dati II, khususnya Kodya Mataram. Namun sejahumana akurasi data untuk dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya masih perlu dipertanyakan. Karena seringkali data yang disajikan belum didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, seperti data yang dibuat karena tuntutan yang mendesak untuk memenuhi laporan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di masa yang akan datang adalah menyangkut data dasar, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah anak sekolah menurut jenjang usia pendidikan. Sedangkan terhadap data

yang tidak bisa diungkap karena belum ter-tangani, seperti data Madrasah Diniyah dan dosen agama Islam pada perguruan tinggi umum, perlu pula dipertimbangkan keber-adaannya. Dalam konteks semacam ini maka perlu pemikiran yang lebih mendalam aspek-aspek apa saja yang layak menjadi indikatoar, cukup sederhana dan memadai atau mewakili sektor-sektor keberhasilan pembangunan bidang agama.

Karena masih terdapatnya kendala di dalam pengumpulan data di lapangan, maka akan lebih bijaksana apabila pada tahap berikutnya Badan Litbang Agama dapat mendiskusikannya kembali dengan melibatk-an instansi terkait, seperti Biro Pusat Statis-tik dan unit-unit operasional di lingkungan Departemen Agama Pusat.

## KEPUSTAKAAN

- Asry, Yusuf, Drs. H. M. (Ed.) : *Indikator Keberhasilan Pembangunan Bidang Agama*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta, 1991-1992.
- Gema Patut Patuh Patju, Humas Pemda Lombok Barat, Mataram, 1991
- Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 1991-1992, Kandepag Kab. Lombok Barat, Mataram, 1992
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tahun 1992-1993, Kandepag Kab. Lombok Barat, Mataram, 1993.
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tahun 1993-1994, Kandepag Kab. Lombok Barat, Mataram, 1994.
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tahun 1994-1995, Kandepag Kab. Lombok Barat, Mataram, 1995.
- Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tahun 1995-1996, Kandepag Kab. Lombok Barat, Mataram, 1996.
- Laporan Tengah Tahunan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat Tahun 1991-1992, Kantor Kab. Lombok Barat, Mataram, 1991.
- Laporan Tahunan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat Tahun 1992-1993, Kantor Kab. Lombok Barat, Mataram, 1993.
- Laporan Tengah Tahunan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, Mataram, Tahun 1994
- Laporan Tengah Tahunan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat, Mataram, Tahun 1994
- Laporan Tahunan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Barat Tahun 1995-1996, Kantor Kab. Lombok Barat, Mataram, 1996.
- Lombok Barat Dalam Angka 1991, Kantor Statistik, Mataram, 1992.
- Lombok Barat Dalam Angka 1992, Kantor Statistik, Mataram, 1993.
- Lombok Barat Dalam Angka 1993, Kantor Statistik, Mataram, 1994.
- Zakaria, Fathurahman, H : "Patut Patuh Patju" Sebagai Kerangka Acuan Kehidupan Masyarakat Lombok, (Bahan Seminar Pemantapan Nilai-nilai Patut Patuh Patju), Mataram, 1990.